

Tinjauan Mata Kuliah

Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mata kuliah Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan agar Anda mempunyai dasar kerangka analisis dalam memecahkan masalah-masalah pemerintahan di daerah. Melalui mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat menganalisis gejala otonomi daerah dan pemerintahan daerah secara komprehensif dengan mengakomodasi isu-isu kekinian, seperti: pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, *good governance*, korupsi, dan isu-isu lainnya yang relevan dalam mata kuliah ini. Kerangka analisis ini perlu dan mencerminkan bentuk pemahaman mahasiswa dalam melihat suatu permasalahan guna mencari solusi berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, maka pembahasan Buku Materi Pokok (BMP) MAPU5203 Pemerintahan Daerah dibagi dalam 9 (sembilan) modul yang saling menunjang dan mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Modul Pertama tentang konsep dasar desentralisasi dan pemerintahan daerah. Modul ini membahas mengenai desentralisasi dalam negara kesatuan dan negara federal; desentralisasi, pelayanan publik dan pelayanan masyarakat; serta pembentukan peraturan daerah.

Modul Kedua tentang dimensi struktural penyelenggaraan otonomi daerah, di mana di dalamnya membahas mengenai pemerintahan daerah, proses pemilihan kepala daerah, serta birokrasi lokal dalam teori dan praktek di Indonesia.

Modul Ketiga tentang perumusan kebijakan publik dan peran lokal dalam kebijakan nasional, di mana di dalamnya membahas mengenai perumusan kebijakan publik, peran lokal dan akses lokal dalam kebijakan nasional.

Modul Keempat tentang otonomi daerah, *good governance*, dan korupsi, di mana di dalamnya membahas mengenai konsep otonomi daerah *good governance*, dan korupsi serta konteks otonomi daerah.

Modul Kelima tentang otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, di mana di dalamnya membahas mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dan sumber daya daerah.

Modul Keenam tentang pemerintahan kawasan perkotaan, di mana di dalamnya membahas mengenai kawasan perkotaan dan kawasan khusus bagi DKI Jakarta sebagai kapita selekta.

Modul Ketujuh tentang manajemen strategik dalam pemerintahan daerah, di mana di dalamnya membahas mengenai konsep manajemen strategik, manajemen strategik dalam pemerintahan daerah serta proses politik manajemen strategik.

Modul Kedelapan tentang pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan daerah, di mana di dalamnya membahas mengenai pengawasan dalam pemerintahan daerah serta model-model pemerintahan daerah akibat pengawasan fungsional.

Modul Kesembilan tentang sistem pemerintahan daerah di berbagai negara, di mana di dalamnya membahas mengenai perbandingan pemerintahan daerah di berbagai negara, dan kasus di Indonesia berdasar Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 32/2004.

Manfaat dan Relevansi Mata kuliah

Mata kuliah Pemerintahan Daerah ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mempelajari pemerintahan daerah maupun bidang ilmu yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan mempelajari mata kuliah Pemerintahan Daerah diharapkan Anda dapat menganalisis gejala otonomi daerah dan pemerintahan daerah secara komprehensif dengan mengakomodasi isu-isu kekinian, seperti: pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, *good governance*, korupsi, dan isu-isu lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peta Kompetensi Pemerintahan Daerah/MAPU5203

